

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Berdirinya suatu perusahaan adalah atas beberapa tujuan, diantaranya untuk memakmurkan para pemangku kepentingan di dalamnya. Salah satu cara untuk tercapainya tujuan perusahaan adalah dengan menjaga kelangsungan usaha di perusahaan tersebut. Kelangsungan hidup suatu perusahaan sangat berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan yang mana membutuhkan sumber pendanaan. Pendanaan adalah suatu aktivitas pembiayaan yang dilakukan perusahaan untuk memenuhi aktivitas operasi dan aktivitas pendukung usaha lainnya. Sumber pendanaan bisa berasal dari pendanaan internal seperti penggunaan laba ditahan, namun jika pendanaan internal dirasa kurang cukup untuk mengembangkan usaha maka perusahaan akan menggunakan sumber pendanaan eksternal seperti pinjaman atau penerbitan surat hutang obligasi (Wardani, 2018).

Sumber dana dari kreditur merupakan hutang bagi perusahaan. Pada tingkat tertentu, hutang mampu menciptakan suatu sistem pengawasan terhadap perusahaan serta dapat digunakan untuk penghematan pajak sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Pada sisi lain, jumlah hutang yang terlalu tinggi akan mengakibatkan semakin tingginya bankruptcy cost atau biaya kebangkrutan. Untuk itu, manajer keuangan selaku agen yang diberi wewenang untuk mengelola

perusahaan, harus mempertimbangkan financing mix atau bauran pembiayaan terbaik bagi perusahaan (Astuti,2014).

Perkembangan setiap perusahaan manufaktur selalu didukung oleh modal. Modal secara umum berasal dari 2 komponen yaitu modal sendiri (pribadi) dan hutang. Dalam hal ini perusahaan manufaktur sering menggabungkan dua komponen tersebut karena apabila hanya mengandalkan modal pribadi pemilik perusahaannya saja tentu perusahaan tidak akan dapat mengembangkan perusahaannya, maka dari itu hutang sangat membantu perusahaan dalam memperluas perusahaannya (ekspansi). Modal yang berasal dari luar perusahaan merupakan hutang bagi perusahaan. Hutang dalam sebuah perusahaan memiliki dampak positif dan negatif. Selain dapat membantu dalam perluasan perusahaan dari sisi positif hutang juga memiliki sisi negatif, semakin tinggi hutang semakin tinggi pula risiko perusahaan sehingga memicu suku bungannya mungkin lebih tinggi, terlalu banyak hutang dapat menghambat perkembangan perusahaan sehingga membuat para pemegang saham akan berpikir dua kali untuk menanamkan modalnya. Apabila hal itu terjadi akan menimbulkan ancaman kebangkrutan pada perusahaan (Puspitasari dan Manik, 2016).

PT Unilever Indonesia (UNVR) menggunakan pendanaan eksternal berupa pinjaman dari afliasinya yang bermarkas di Swiss sejak Mei 2017 yaitu Unilever Finance International senilai Rp 3 triliun guna menambah kapasitas pabrik. Fasilitas pinjaman tersebut berlaku mulai 15 Juni 2017 hingga 14 Juni 2022. Penarikan fasilitas pinjaman itu fleksibel selama tenornya masih berlaku.

Penarikan utang tersebut bisa dilakukan berulang. Tenor setiap penarikan juga bervariasi, minimal satu bulan dan maksimal selama satu tahun.

Selain pinjaman Rp 3 triliun, UNVR masih punya beberapa sisa fasilitas pinjaman. Satu hal yang pasti, pinjaman dari Unilever Finance International itu tak hanya fleksibel dari sisi tenor, tapi juga bunga yang lebih murah. Bunga atas pinjaman tersebut ditetapkan minimal 0,15% di bawah penawaran bunga atas alternatif pinjaman terendah yang ada dengan jangka waktu yang sama. (Sumber : <http://investasi.kontan.co.id>)

Fenomena yang terkait dengan kebijakan hutang di perusahaan indeks LQ45 pada PT. Waskita Karya Tbk (WSKT), perusahaan ini mencatatkan peningkatan jumlah utang yang cukup signifikan pada akhir kuartal III 2016. Total utang perusahaan konstruksi ini meningkat 65,41% dari tahun lalu Rp 20,6 triliun menjadi Rp 34,09 triliun. Penambahan utang tersebut merata pada utang jangka pendek maupun jangka panjang perusahaan.

Dalam laporan keuangan perusahaan yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) tercatat jumlah utang jangka pendek perusahaan hingga akhir September mencapai Rp 22,28 triliun. Padahal pada periode yang sama tahun lalu hanya Rp 13,66 triliun. Dari jumlah tersebut, porsi utang bank jangka pendek mencapai Rp 7,59 triliun. Pinjaman tersebut berasal dari bank pemerintah dan juga bank swasta. Rata-rata bungannya sekitar 9,5% sampai 10,5%. Sedangkan utang jangka panjang WSKT meningkat 70,17% dari Rp 6,94 triliun menjadi Rp 11,81 triliun. Perseroan memiliki tanggungan utang obligasi yang sebesar Rp

5,67 triliun. Sedangkan jumlah utang bank jangka panjang hanya memberi kontribusi sebesar Rp 3,52 triliun. Meski utangnya bertambah, tetapi perseroan juga berhasil mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan di akhir September. Pendapatan perusahaan tumbuh 88,22% dari Rp 7,44 triliun menjadi Rp 14,01 triliun. Sedangkan perolehan laba bersih tumbuh 133,46% dari Rp 400 miliar menjadi Rp 934,52 miliar. Jadi kesimpulan dari fenomena tersebut bahwa setiap perusahaan membutuhkan hutang untuk membantu dalam mendanai perusahaan agar tetap beroperasi dan begitu pentingnya kebijakan hutang sebagai kemampuan perusahaandalam mengembalikan hutangnya kepada kreditor (Sumber : investasi.kontan.co.id)

Pemegang saham pendiri sekaligus pemegang saham pengendali PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) masih melanjutkan aksinya mengurangi kepemilikan saham. Akhir pekan lalu, PT Tiga Pilar Corpora lagi-lagi melepas saham AISA. Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pada Jumat (29/6), Tiga Pilar Corpora telah melepas 61,63 juta saham AISA. Alhasil, total kepemilikan saham Tiga Pilar Corpora di AISA hanya tersisa 169,86 juta saham AISA. Jumlah tersebut setara dengan 5,28% dari seluruh saham beredar. Jika dihitung, sepanjang Juni 2018, Tiga Pilar Corpora telah melepas sekitar 213,3 juta saham AISA.

Pada akhir Mei lalu, Tiga Pilar Corpora tercatat masih menguasai 383,2 juta saham AISA atau sebesar 11,91%. Artinya, hanya dalam kurun waktu sebulan, kepemilikan Tiga Pilar Corpora di AISA telah berkurang lebih dari

separuhnya. Sementara itu, komposisi pemegang saham lain dengan kepemilikan di atas 5% tidak mengalami perubahan. Per 29 Juni 2018, KKR masih menguasai 9,09% kepemilikan saham di AISA melalui KKR Asset Management LLC. Fidelity Funds-Pacific masih mendepak 7,83% saham AISA. Morgan Stanley masih tercatat memiliki 6,52%, Primanex Limited sebesar 5,38%, dan JP Morgan and Chase Bank (JPMCB) Na Re-Trophy Investor I Ltd. memiliki 9,33%. Tidak adanya perubahan komposisi dan persentase kepemilikan pemegang saham lain selain Tiga Pilar Corpora otomatis membuat kepemilikan pemegang saham publik meningkat.

Akhir Mei lalu, investor publik tercatat menguasai 49,94% kepemilikan saham AISA. Kini, kepemilikan saham investor publik di AISA telah meningkat menjadi 56,57%. Nahas, kenaikan porsi kepemilikan saham investor publik ini terjadi di saat harga saham AISA terus-menerus tertekan lantaran fundamental perusahaan memburuk pasca kasus hukum menimpa bisnis beras pada pertengahan 2017. Akhir pekan lalu, AISA baru merilis laporan keuangan per 31 Desember 2017. Hasilnya, AISA tercatat menderita rugi bersih sebesar Rp 551,9 miliar. Padahal, per 31 Desember 2016, AISA masih mencetak laba bersih senilai Rp 581 miliar. Selain merugi, ancaman gagal bayar utang juga tengah mengancam AISA.

Kamis pekan ini (5/7), AISA harus membayar bunga Obligasi TPS Food I/2013 dan biaya ijarah atas Sukuk Ijarah TPS Food I/2013. Total bunga kedua surat utang tersebut Rp 46,12 miliar. Padahal, dalam keterbukaan informasi

di Bursa Efek Indonesia yang dirilis akhir pekan lalu, Sekretaris Perusahaan AISA Ricky Tjie mengatakan, posisi kas perusahaan per 26 Juni 2018 hanya sebesar Rp 48 miliar. Jumlah kas tersebut bisa jadi memang mencukupi untuk membayar bunga utang yang jatuh tempo dua hari mendatang. Namun, pada 19 Juli mendatang, AISA juga harus membayar *fee* ijarah atas Sukuk Ijarah TPS Food II/2016 senilai Rp 63,3 miliar. Kinerja yang buruk dan risiko pembayaran bunga utang itu membuat tekanan ke harga saham AISA semakin menjadi. Kemarin, Senin (2/7), harga saham AISA kembali turun hingga 21,72% menjadi Rp 191 per saham. Dalam kurun waktu sebulan terakhir, harga saham AISA anjlok hingga 59,87%. (Sumber : businessinsight.kontan.co.id)

Rasio profitabilitas perusahaan pembiayaan, PT Buana Finance Tbk merosot, atau turun di sepanjang bulan Januari hingga Maret 2018. Salah satunya terlihat dari penurunan return on asset (RoA). Corporate Secretary Buana Finance Ted Suyani mengatakan, sampai dengan Maret 2018, perseroan ini mencatat RoA di angka 0,46%, turun 18 basis poin (bps) dibandingkan periode yang sama di tahun 2017 yakni sebesar 0,64%. Menurutnya, penurunan RoA itu dipengaruhi, rendahnya tingkat penyaluran pembiayaan di kuartal pertama 2018.

Diketahui, tiga bulan pertama 2018, pembiayaan yang tersalurkan sebesar Rp 617,95 miliar, atau turun 34,7% dari periode yang sama di tahun lalu. "Penurunan itu kemudian mempengaruhi tingkat pencapaian pendapatan, terutama terkait pencatatan administrasi," kata Ted kepada Kontan.co.id, Minggu (27/5). RoA sendiri, merupakan instrumen untuk mengukur kemampuan suatu

multifinance, dalam menghasilkan keuntungan dari sisi aset yang dimilikinya. Semakin tinggi RoA berarti rasio profitabilitas multifinanse semakin baik dari segi penggunaan aset. Oleh karenanya, rasio profitabilitas yang membaik ini didukung oleh kenaikan laba bersih. Namun, dari laporan keuangan perusahaan per Maret 2018, tercatat bahwa laba bersih Buana Finance turun 22,8% menjadi Rp 20,3 miliar. Sedangkan dari sisi aset, Buana Finance mencatatkan pertumbuhan sebesar 7%, dari total aset Rp 4,41 triliun di tahun 2018.

Buana Finance berharap, di akhir tahun, ada kenaikan persentase RoA. "Sampai akhir tahun 2018 perseroan menargetkan RoA di kisaran 1,95%, atau meningkat dari tahun 2017 yaitu 1,66%," ungkapnya. Demi memenuhi target RoA tersebut, perseroan akan melakukan tiga langkah strategis, di antaranya menjaga atau menurunkan tingkat kredit macet (NPF) lewat bantuan tim bisnis dan dilakukan secara berkala. Strategi selanjutnya adalah meningkatkan efisiensi biaya operasional dan meninjau kinerja Buana Finance secara berkelanjutan. Kemudian, melakukan riset pasar, yang tujuannya untuk mengetahui jenis produk apa saja yang dibutuhkan masyarakat. Dari situ, diharapkan bisa memberikan hasil yang baik, bagi kinerja maupun pendapatan perusahaan. "Itu semua strategi yang kami lakukan demi menjaga RoA, di mana harus menciptakan margin dan revenue yang cukup. Serta menekan biaya operasional, yang dilanjutkan dengan funding, tingkat cost funding serta manajemen resiko untuk meredam NPF," pungkasnya. (Sumber : keuangan.kontan.co.id).

Hutang merupakan salah satu sumber pembiayaan eksternal yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kebutuhan dananya. Dalam pengambilan keputusan akan penggunaan hutang ini harus mempertimbangkan besarnya biaya tetap yang muncul dari hutang berupa bunga yang akan menyebabkan semakin meningkatnya leverage keuangan dan semakin tidak pastinya tingkat pengembalian bagi para pemegang saham biasa. Selain itu kebijakan utang perusahaan juga berfungsi sebagai mekanisme monitoring terhadap tindakan manajer yang dilakukan dalam pengelolaan perusahaan. Keputusan pembiayaan atau pendanaan perusahaan akan dapat mempengaruhi struktur modal perusahaan (Lestari,dkk ,2018)

Kebijakan hutang merupakan kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen perusahaan dalam rangka memenuhi pembiayaan operasional perusahaan. Penggunaan hutang dapat menguntungkan bagi perusahaan, terutama dalam hal pengurangan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah (Iskandar, 2017).

Kebijakan hutang merupakan salah satu keputusan pendanaan yang berasal dari luar perusahaan. Manajemen dalam mengambil keputusan pendanaan menggunakan kebijakan hutang yang diukur melalui Debt Equity Ratio. Peningkatan hutang yang tinggi dikarenakan perusahaan lebih banyak menggunakan dana dari hutang untuk aktifitas operasionalnya daripada modal sendiri sehingga mengakibatkan risiko yang dihadapi perusahaan juga meningkat (Puspitasari dan Manik, 2016).

Menurut (Gillan dalam Lemma,2015) mengemukakan tentang keuangan perusahaan, bahwa pilihan utang-ekuitas perusahaan tidak hanya keputusan tentang instrumen pembiayaan alternatif tetapi juga keputusan tentang bentuk-bentuk alternatif dari mekanisme tata kelola perusahaan. Menurut (Jensen et al dalam Fabrizio Rossi dan Richard J. Cebula, 2016) mengemukakan bahwa hutang dan struktur kepemilikan dapat mewakili mekanisme internal yang sangat baik untuk pengendalian biaya agensi.

Kepemilikan institusional adalah proporsi saham perusahaan yang dimiliki institusi baik pemerintah, perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain baik dalam negeri ataupun asing dengan kepemilikan di atas lima persen (5%) (Abdurrahman,dkk, 2019). Semakin besar institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan. Dengan demikian proporsi kepemilikan institusional bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan manajemen (Lestari, 2018).

Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba (Lestari, 2018).

Pertumbuhan perusahaan merupakan perubahan total aset baik berupa peningkatan maupun penurunan yang dialami oleh perusahaan selama satu

periode (satu tahun) atau dengan kata lain pertumbuhan perusahaan merupakan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan size (Abdurrahman,dkk, 2019).

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (Iskandar, 2017). Profitabilitas juga dapat mempengaruhi kebijakan hutang. Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan memperoleh laba sehingga mampu mendanai kegiatan investasi perusahaan jangka panjang (Astuti, 2014).

Penelitian terkait dengan hubungan kepemilikan institusional terhadap kebijakan hutang telah dilakukan oleh Lestari dkk, (2018) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan hutang dan Abdurrahman dkk, (2019) yang hasilnya menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kebijakan utang perusahaan. Sementara penelitian Nofiani (2018), Astuti (2014) dan Iskandar, (2017) yang hasil penelitiannya yaitu kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang.

Penelitian terdahulu terkait dengan hubungan pertumbuhan perusahaan terhadap kebijakan hutang telah dilakukan oleh Abdurrahman (2019) yang penelitiannya bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang perusahaan. Sedangkan menurut Puspitasari dan Manik (2016), Iskandar (2017) dan Wardani (2018) yang hasilnya menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan perusahaan memiliki arah yang negatif tidak signifikan terhadap kebijakan hutang.

Hasil penelitian dari beberapa peneliti sebelumnya yang membahas tentang keterkaitan dengan hubungan profitabilitas terhadap kebijakan hutang diantaranya yaitu Astuti (2014) yang penelitiannya bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang perusahaan. Penelitian Iskandar (2017) yang hasilnya menunjukkan bahwa variabel profitabilitas memiliki arah yang negatif signifikan terhadap kebijakan hutang. Penelitian Sheisarvian, dkk (2015) yang hasilnya yaitu variabel profitabilitas berpengaruh secara signifikan dan berhubungan negatif terhadap kebijakan hutang. Sedangkan penelitian Sulhan dan Nurillah (2018) menghasilkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang dan Anindhita (2017) yang hasil penelitiannya bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Kebijakan Hutang.

Menurut (Novianto, 2017) Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor dalam penentuan kebijakan dividen. Apabila perusahaan mempunyai ukuran perusahaan yang besar maka perusahaan akan mengalami kemudahan aksesibilitas ke pasar modal sehingga dapat memperoleh dana yang lebih besar dengan catatan perusahaan tersebut memiliki rasio pembayaran dividen lebih besar dibandingkan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan menggambarkan tentang seberapa besar atau banyaknya aset yang dimiliki perusahaan tersebut hingga seberapa besar rata-rata pendapatan yang diperoleh perusahaan tersebut pada tiap tahunnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Pertumbuhan**

Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Kontrol” (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2018)

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah diantaranya :

1. Kelangsungan hidup suatu perusahaan sangat berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan yang mana membutuhkan sumber pendanaan.
2. Jumlah hutang yang terlalu tinggi akan mengakibatkan semakin tingginya *bancruptcy cost* atau biaya kebangkrutan.
3. Semakin tinggi hutang semakin tinggi pula risiko perusahaan dan terlalu banyak hutang dapat menghambat perkembangan perusahaan sehingga membuat para pemegang saham akan berpikir dua kali untuk menanamkan modalnya.
4. Peningkatan hutang yang tinggi dikarenakan perusahaan lebih banyak menggunakan dana dari hutang untuk aktifitas operasionalnya, daripada modal sendiri sehingga mengakibatkan risiko yang dihadapi perusahaan juga meningkat.
5. Jika institusional rendah maka efisien pemanfaatan aktiva perusahaan akan berkurang.

6. Kurangnya kualitas kepemilikan institusional akan mengakibatkan perusahaan sulit untuk menentukan kebijakan.
7. Minimnya total aset akan berdampak kepada rendahnya kemampuan perusahaan untuk meningkatkan ukuran perusahaan.
8. Perusahaan harus mampu untuk meningkatkan penghasilan laba selama periode tertentu.

1.3 BATASAN MASALAH

Agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak terlalu luas, penulis membatasi penelitian ini agar tidak menyimpang dari kerangka acuan yang telah ditetapkan. Mengingat banyaknya hal yang mempengaruhi Kebijakan Hutang Perusahaan, serta keterbatasan kemampuan penulis maka dalam kemampuan ini pembatasan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kebijakan Hutang Perusahaan dengan variabel kontrol yang digunakan yaitu Ukuran Perusahaan.
2. Variabel Independen yang digunakan yaitu Kepemilikan Institusional, Pertumbuhan Perusahaan, dan Profitabilitas.
3. Variabel Dependen yang digunakan yaitu Kebijakan Hutang Perusahaan.

1.4 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimanakah pengaruh kepemilikan institusional secara parsial terhadap kebijakan hutang perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018?
2. Bagaimanakah pengaruh pertumbuhan perusahaan secara parsial terhadap kebijakan hutang perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018?
3. Bagaimanakah pengaruh profitabilitas secara parsial terhadap kebijakan hutang perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018?
4. Bagaimanakah pengaruh kepemilikan institusional, pertumbuhan perusahaan, dan profitabilitas secara simultan terhadap kebijakan hutang perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018?
5. Bagaimanakah pengaruh kepemilikan institusional, pertumbuhan perusahaan, dan profitabilitas secara simultan terhadap kebijakan hutang perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018?
6. Bagaimanakah pengaruh kepemilikan institusional secara parsial terhadap kebijakan hutang perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018?

7. Bagaimanakah pengaruh pertumbuhan perusahaan secara parsial terhadap kebijakan hutang perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018?
8. Bagaimanakah pengaruh profitabilitas secara parsial terhadap kebijakan hutang perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018?
9. Bagaimanakah pengaruh ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol secara parsial terhadap kebijakan hutang perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018?

1.5 TUJUAN DAN MANFAAT

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI).

3. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Profitabilitas terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI).
4. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Kepemilikan Institusional, Pertumbuhan Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI).
5. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Kepemilikan Institusional, Pertumbuhan Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan dengan variabel kontrol yaitu Ukuran Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI).
6. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan dengan variabel kontrol yaitu Ukuran Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI).
7. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan dengan variabel kontrol yaitu Ukuran Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI).
8. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Profitabilitas terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan dengan variabel kontrol yaitu Ukuran Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI).

9. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.5.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Pengaruh *Kepemilikan Institusional*, *Pertumbuhan Perusahaan*, dan *Profitabilitas* terhadap *Kebijakan Hutang Perusahaan* dengan *Ukuran Perusahaan* sebagai variabel Kontrol.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Peneliti

Diharapkan menambah wawasan mengenai Pengaruh *Kepemilikan Institusional*, *Pertumbuhan Perusahaan*, dan *Profitabilitas* terhadap *Kebijakan Hutang Perusahaan* dengan *Ukuran Perusahaan* sebagai variabel Kontrol.

- b) Bagi Management dan Perusahaan.

Diharapkan dapat menjadi masukan mengenai pentingnya *Kepemilikan Institusional*, *Pertumbuhan Perusahaan*, dan *Profitabilitas* terhadap

Kebijakan Hutang Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel Kontrol.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan dapat memberikan manfaat yang baik dalam upaya memaksimalkan nilai perusahaan sebagai tujuan utama perusahaan.